BAB V

KESIMPULAN

Presiden Erdogan memiliki peranan untuk membuat sebuah kebijakan dan memiliki tanggung jawab sebagai aktor politik yang mampu melindungi negara serta publik agar tetap tentram dan damai. Dalam memerankan perannya sebagai norm entrepreneur, Turki dihadapkan oleh beberapa tantangan penting dalam lokalisasi norma demokrasi di kawasan Timur Tengah. Adanya tantangan ini berpengaruh terhadap kredibilitas Turki sebagai norm entrepreneur dalam lokalisasi norma demokrasi dikawasan, namun seiring waktu, Turki berupaya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut sehingga pemerintah Turki muncul sebagai aktor yang memang kredibel dalam menjalankan agenda penyebaran demokrasi diTimur Tengah. Tantangan yang dihadapi oleh Turki dalam menjalankan perannya sebagai norm entrepreneur dapat dibagi menjadi dua, yakni tantangan domestik yang muncul dari dalam serta tantangan legaci yang muncul dari riwayat Turki sebagai pelanggar hak asasi manusia dalam beragam episode sejarah.[153]

Munculnya kebijakan luar negeri Turki dalam demokratisasi di Timur Tengah dimulai dari adanya inisiatif Turki untuk melakukan pendekatan ke kawasan Timur Tengah. Menurut Nader Habibi dan Joshua Walker (2011), inisiatif

[153]Hadza Min Fadhli Robby,*op.cit.*, hlm. 42.

Turki untuk mendekat ke Timur Tengah memang banyak tercatat pada masa-masa pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis, karena pemerintah pastinya akan memperhatikan aspirasi publik untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.[154]

Dalamtantangan domestik, Turki dihadapkan pada sebuah permasalahan penting yakni masalah pertentangan antara pemerintah Turki dengan kalangan Gülen. Pada kasus pertama, yakni pertentangan antara pemerintah Turki dengan kalangan Gülen, pemerintah Turki dihadapkan pada adanya kecenderungan bahwa institusi Gülen yang merupakan sebuah lembaga non-pemerintah mulai muncul secara dominan melalui pengikut-pengikut Gülen yang menempati posisi penting di berbagai institusi-institusi pemerintahan, seperti misalnya institusi peradilan dan kepolisian. Eksistensi pengikut Gülen dalam institusi peradilan dan kepolisian ini kemudian memberikan tantangan terhadap pemerintahan Turki yang saat ini dikuasai oleh AKP (Balci, Turkeys Gülen Movement: Between Social Movement and Politics, 2013). Dari perspektif pemerintahan Turki yang saat ini dikuasai AKP, kehadiran Gülen menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi eksistensi pemerintahan AKP yang menganggap bahwa hadirnya personil-personil di institusi pemerintahan yang berafiliasi dengan Gülen seolah sebuah upaya untuk melakukan pengawasan dan delegitimasi terhadap AKP. Sedangkan, dari perspektif sebaliknya, institusi Gülen melihat bahwa pemerintahan Turki di bawah AKP merupakan pemerintahan yang memiliki tendensi otoritarian, koruptif dan tidak

[154] Habibi, N., & Walker, J. W. (2011, April). *What's Driving Turkey's Reengagement with the Arab World?* Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies(49). Hlm. 6.

demokratis, sehingga perlu diawasi, bahkan perlu diganti untuk kelangsungan proses demokratisasi di Turki.[155]

Terjadi kudeta militer di Turki pada Juli2016, sehingga Erdogan mengeluarkan kebijakan bahwa kelompok Gülenisme atau Hizmet merupakan kelompok terlarang, dan semua yang pro-Gülen dan berafiliasi dengan Gülen mendapat penjagaan yang ketat. Kebijakan Erdogan terhadap kelompok Gulenisme, memberikan efek domino terhadap kehidupan Turki, baik dalam maupun luar negeri. Dimana kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan pasca kudeta memberikan implikasi cukup serius pada stabilitas hubungan politik luar negeri Turki dengan negara-negara lain pasca dikeluarkannya kebijakan Erdogan yang melarang seluruh aktivitas organisasi Gülen, salah satunya dengan Amerika. Hal ini bisa dilihat dari bergesernya posisi Turki dalam konflik Suriah, dimana pada awalnya sebelum kudeta 2016, Turki bersama Amerika mendukung kelompok oposisi di Suriah. Namun ketidak berpihakan Amerika dan NATO dalam penyelesaian kasus kudeta gagal yang didalangi oleh Gülen, menyebabkan Turki berbalik arah ke Rusia dan lebih banyak berdiskusi mengenai penyelesaian konflik di Suriah yang notabennya merupakan musuh Amerika dan NATO. Dan keadaan ini membuat keretakan terhadap hubungan bilateral kedua Negara tersebut.

Selain dengan Amerika, perubahan arah politik luar negeri Turki juga terjadi dengan negara penguasa blok Timur, Rusia. Sebelum kudeta militer di Turki pada 2016 yang lalu, hubungan Turki dan Rusia cenderung berada dalam fase yang

[155] Hadza Min Fadhli Robby, *op.cit.*, hlm. 43.

buruk. Bahkan dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-20, hubungan antara Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Rusia buruk karena kedua negara tersebut beberapa kali berperang. Namun, pada tahun 1920-an, Rusia yang saat itu dikuasai oleh kaum Bolshevik membantu Gerakan Nasional Turki selama Perang Kemerdekaan Turki, sehingga pemerintah di Moskwa dan Ankara memiliki hubungan yang hangat. Pada tahun 1932, Republik Turki untuk pertama kalinya meminjam uang dari luar negeri, dan sumbernya berasal dari Uni Soviet.

Namun hubungan keduanya berubah pasca-Kudeta 2016. Renggangnya hubungan Turki dan Amerika memberikan implikasi terhadap hubungan Turki dan Rusia. Perubahan drastis hubungan Turki-Rusia disebut telah membuat barat terkejut. Moskow dan Ankara diyakini mengirim "pesan multidimensi" ke Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menunjukkan Rusia dan Turki dapat membentuk aliansi ekonomi dan politik alternatif dan tetap menjadi pemain berpengaruh di papan catur Suriah.[156]

Telah terjadi perubahan 180 derajat hubungan Rusia-Turki telah menangkap masyarakat internasional dan negara-negara Barat lengah.Selain pembaharuan pembicaraan di Suriah, Rusia dan Turki memiliki sejumlah proyek energi dan hubungan perdagangan yang juga segera mencair setelah terganggu dengan penembakan Su-24 Rusia oleh F-16 Turki pada 24 November 2015 di perbatasan Suriah-Turki.[157] Tetapi bagaimanapun Rusia dan Turki baru-baru ini menunjukkan

---

[156] *Hubungan Turki Rusia Berubah 180 Derajat, op.cit.*
[157] *Ibid.*

kepada Barat bahwa mereka mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan tetap menjadi pemain berpengaruh di Timur Tengah.

Di samping itu pula, kebijakan Erdogan kepada Gülen berdampak pada penutupan atau melarang seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan Gülen. Hal ini tentu berdampak pada beberapa negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga Gülen, salah satunya adalah Indonesia. Dimana Turki meminta untuk menutup sekolah-sekolah yang terkait dengan jaringan Gülen di Indonesia. Kemudian hubungan keduanya tambah renggang, ketika beberapa mahasiswa Indonesia yang belajar di Turki ditangkap oleh pihak keamanan Turki "karena memiliki jaringan dengan Gülen".[158]

[158]*Satu Lagi Mahasiswa Indonesia ditahan Otoritas Turki*, http://nasional.republika.co.id, akses pada tanggal 30 Januari 2017, pada pukul 16.00.